

BAB I

PENDAHULUAN

Bab ini merupakan bagian pendahuluan yang menjadi landasan awal penelitian mengenai batik sebagai strategi diplomasi budaya Indonesia dalam kontestasi budaya dengan Malaysia periode 2019–2025. Bab ini akan menjelaskan latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, kerangka pemikiran teoritis, operasional konsep, alur berpikir, argumen penelitian, hingga metode penelitian yang digunakan.

1.1 Latar Belakang Masalah

Warisan budaya berfungsi sebagai penghubung identitas yang sering menjadi objek narasi mengenai klaim yang terkadang adanya gesekan antar negara, terutama ketika sebuah negara tersebut memiliki persamaan dengan negara lainnya. Salah satu fenomena yang bisa dianalisis yaitu ketika terjadinya ketegangan antara Indonesia dan Malaysia, negara serumpun yang berdekatan dan memiliki budaya yang hampir sama dari segi bahasa, agama, dan sejarah migrasi yang panjang. Hal ini tentu menjadi ketegangan dari narasi klaim atas warisan budaya bersama (Clark, 2013). Sehingga terjadinya sentimen negatif yang justru menjadi konflik antara hubungan bilateral Indonesia dan Malaysia pada kontestasi budaya dalam narasi klaim batik.

Ketegangan dalam hubungan Indonesia dan Malaysia yang berkaitan dengan narasi klaim budaya tersebut tidak berdiri sendiri, namun berkembang melalui sejumlah sejarah dan representasi budaya yang muncul dalam ruang publik. Salah satu peristiwa yang dapat diperlihatkan yang terjadi pada tahun 2007 sebagai

contoh pendukung penelitian ini, ketika program pariwisata *Malaysia Truly Asia* menampilkan lagu Rasa Sayange dalam *jingle*-nya, disertai narasi klaim atas alat musik yang mirip dengan angklung yang disebut *malay bamboo*, serta penggunaan Tarian Pendet dalam iklan pariwisata tersebut yang melibatkan sejumlah elemen budaya yang oleh masyarakat Indonesia dianggap sebagai warisan eksklusif milik Indonesia (Riswandi & Mahmahsani, 2009; Sunarti & Fadeli, 2021). Situasi kemudian semakin memanas ketika batik masuk ke dalam perdebatan pada 2008, seiring Malaysia yang mulai aktif memasarkan batik ke pasar internasional (Clark, 2013). Dengan demikian, batik bukanlah kasus yang berdiri sendiri, melainkan salah satu titik dari pola ketegangan klaim budaya yang sudah berlangsung sejak sebelum 2009.

Sehingga, warisan budaya tidak hanya dapat dipahami sebagai identitas yang perlu dilestarikan, tetapi juga dapat menjadi sumber daya yang dimanfaatkan dalam hubungan internasional. Namun, pada nyatanya adanya ketegangan yang timbul dari klaim budaya antara negara yang memiliki peradaban yang sama. Sehingga, ketegangan yang terjadi kerap berulang tanpa penyelesaian yang bersifat struktural sehingga menjadi sentimen negatif (Sunarti & Fadeli, 2021).

Narasi tentang klaim warisan budaya tersebut sering menimbulkan gesekan yang menghambat stabilitas dalam hubungan bilateral. Adanya ketegangan budaya tidak hanya berkaitan dengan narasi klaim budaya, namun berkaitan pula dengan persepsi publik sehingga menimbulkan identitas nasional masyarakat yang telah dibentuk sebelumnya antara kedua negara (Chong, 2012). Ketegangan ini juga diperoleh dengan cara melihat pada media masa di kedua negara dengan cara

melihat isu yang sama secara berbeda pada media sosial yang dimana di Indonesia cenderung menilai Malaysia dramatis dan provokatif, sementara media Malaysia meresponsnya dengan lebih tenang (Mulyana & Yaputra, 2020). Hal ini pada akhirnya memperlihatkan bahwa identitas dan sentimen antar negara bukan sesuatu yang tetap, melainkan terus dibentuk melalui proses interaksi sosial dan pemberitaan yang berlangsung (Wendt, 1992).

Pola ketegangan ini pun masih berlanjut hingga saat ini yang didukung dengan salah satu peristiwa ketegangan yang salah satu contoh peristiwa yang digunakan dalam penelitian ini pada tahun 2025. Narasi klaim atas batik kembali terlihat melalui kasus penyanyi Aisha Retno yang memicu gelombang protes publik di media sosial, hal ini menunjukkan bahwa narasi klaim budaya terhadap batik masih terus berulang bahkan setelah lebih dari satu dekade sejak pengakuan UNESCO tahun 2009 pada interaksi media sosial. Hal ini mengindikasikan bahwa ketegangan tersebut tidak selesai secara struktural, melainkan bertransformasi mengikuti perkembangan ruang publik, termasuk ke ranah digital.

Hal penting yang bisa dilihat seperti halnya budaya lokal seperti warisan tak benda yang dikembangkan oleh komunitas UNESCO yang dilandasi dengan *Intangible Cultural Heritage* (ICH) yang dimana Indonesia menjadi salah satu yang masuk dalam praktik yang dilakukan oleh UNESCO. Dalam konsep ini, semakin relevan jika warisan budaya tidak hanya sebuah identitas yang perlu dijaga, melainkan bisa sebagai alat yang strategis dalam hubungan diplomatiknya untuk membangun citra yang positif dalam hubungan bilateral.

United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization yang dikenal sebagai UNESCO. Badan organisasi yang berdiri sejak 1945 yang dinaungi oleh Perserikatan Bangsa-bangsa. UNESCO bergerak di bidang pendidikan, budaya, dan ilmu pengetahuan di seluruh dunia. Baik dari aspek budaya benda dan takbenda, maupun warisan alam dunia UNESCO membentuk sebuah inisiatif dalam pelestarian kebudayaan, terlebih lagi pada Warisan Budaya Takbenda yang kemudian diaplikasikan kepada *Intangible Cultural Heritage* (ICH). *Intangible Cultural Heritage* dikenal praktik bagaimana budaya diekspresikan serta pengetahuan dan keterampilan yang dianggap suatu komunitas dari warisan budaya (Jokilehto, 2005).

Intangible Cultural Heritage merujuk pada ekspresi, praktik, pengetahuan yang diakui oleh warisan budaya mereka. Pada tanggal 2 Oktober 2009, Indonesia mendapatkan pengakuan dari UNESCO terhadap batik sebagai *Intangible Cultural Heritage*. Sehingga dalam legitimasi internasional nya Indonesia bisa menggunakan warisan budaya tersebut untuk membangun kepercayaan dan menstabilkan hubungan bilateral dengan Malaysia (Kunjuraman et al., 2025). Sehingga hal tersebut menjadi titik penting dalam penelitian ini karena memberikan legitimasi internasional terhadap batik sekaligus membuka ruang bagi Indonesia untuk memanfaatkan batik tidak hanya sebagai warisan budaya, tetapi juga sebagai medium dalam hubungan internasional.

Dalam perkembangannya, batik kemudian tidak hanya ditempatkan sebagai warisan budaya yang perlu dilestarikan dan dijaga, tetapi juga sebagai sumber daya budaya yang dapat digunakan untuk membangun citra dan daya tarik Indonesia.

Penggunaan batik dalam berbagai aktivitas promosi budaya dan hubungan internasional menunjukkan adanya pergeseran dari upaya mempertahankan batik sebagai identitas menuju pemanfaatannya sebagai medium diplomasi budaya. Selanjutnya, melihat sentimen negatif antara Indonesia dengan Malaysia atas narasi klaim batik sebagai warisan budaya negara mereka masing-masing tidak terjadi secara tiba-tiba. Terdapat rangkaian insiden yang panjang dan secara masif terjadi pada tahun 2007 ketika program pariwisata *Malaysia Truly Asia* yang menampilkan beberapa elemen budaya yang Indonesia anggap sebagai warisan eksklusif milik Indonesia (Sunarti & Fadeli, 2021). Perdebatan ini akhirnya sampai pada titik dimana sejumlah masyarakat Indonesia menuntut penutupan Kedutaan Malaysia di Jakarta, hal ini memperlihatkan betapa dalamnya isu klaim budaya ini (Chong, 2012). Situasi kemudian semakin memanas ketika batik masuk ke dalam perdebatan pada 2008, sehingga Malaysia aktif memasarkan batik ke pasar internasional (Clark, 2013).

Adanya transformasi batik yang berawal dari objek sentimen negatif hingga menjadi alat untuk diplomasi budaya terjadi karena proses yang dilalui dan tidak instan, hal ini merupakan proses rekonstruksi narasi yang dilakukan oleh negara sesuai pada kepentingan yang dibutuhkan oleh Kebijakan Luar negerinya. Pada pasca pengakuan UNESCO 2009, Indonesia mulai membangun citra positif dan mulai mempromosikan batiknya untuk memperkuat kepercayaan nya dalam hubungan bilateral, dibandingkan harus melindungi batik dari Malaysia (Nye, 2004). Dengan pergeseran ini diplomasi budaya dipahami sebagai upaya negara yang menggunakan alat untuk kebijakan luar negerinya dalam mencapai tujuan

diplomasi tanpa tekanan apapun. Dengan adanya hubungan bilateral Indonesia dan Malaysia, menunjukkan bahwa batik pasca-UNESCO 2009 dapat menjadi titik awal Indonesia untuk menjalin kerjasama bilateral dalam mengelola warisan budaya mereka masing-masing sebagai alat untuk kerjasama.

Selain itu, budaya seperti batik tidak bisa dimiliki secara eksklusif oleh suatu negara. Maka karena itu, penelitian ini tidak berhenti pada batik sebagai alat diplomasi budaya saja, melainkan menganalisis bagaimana batik berperan dalam merespons dan meredakan pola ketegangan narasi klaim budaya yang telah berlangsung antara Indonesia dan Malaysia, khususnya pada periode 2019–2025.

1.2 Perumusan Masalah

Rumusan masalah dalam penelitian ini menganalisis mengenai, “Bagaimana strategi diplomasi budaya Indonesia melalui Batik sebagai Warisan Budaya Takbenda dalam meredakan ketegangan narasi klaim budaya antara Indonesia dan Malaysia?”

1.3 Tujuan Penelitian

Pada penelitian ini bertujuan untuk memahami dan menganalisis batik sebagai warisan budaya takbenda dalam strategi diplomasi budaya dalam hal membangun hubungan bilateral terhadap Indonesia dan Malaysia. Hal ini meliputi analisis ketegangan yang ada dalam masyarakat terhadap narasi klaim budaya. Kemudian, mengkaji batik sebagai medium promosi budaya serta alat diplomasi budaya dalam hubungan bilateral Indonesia dengan Malaysia. Peneliti juga akan

menganalisis bagaimana diplomasi budaya melalui batik digunakan pemerintah maupun aktor non negara dalam membangun citra positif serta menjalin hubungan bilateral dengan Malaysia.

1.4 Kegunaan Penelitian

Secara praktis, dalam penelitian ini dapat menjadi gambaran dalam mengambil kebijakan luar negeri Indonesia, tentu dalam hal merancang strategi diplomasi budaya yang lebih baik dalam menjaga dan mengelola hubungan bilateral Indonesia dengan Malaysia. Sehingga, dalam penelitian ini memberikan pandangan mengenai potensi batik sebagai medium untuk meredam sentimen negatif yang terus terjadi antara Indonesia dan Malaysia. Maka dari itu, diharapkan penelitian ini dapat menjadi pandangan bagi pemerintahan Indonesia dalam menjaga warisan budaya sebagai alat diplomasi, tidak hanya simbolik.

Secara teoritis, penelitian ini memberikan pandangan terhadap Hubungan Internasional dalam diplomasi budaya yang memiliki turunan soft power. Penelitian ini ingin menganalisis bagaimana warisan budaya takbenda yang mendapatkan pengakuan dari UNESCO yang berfungsi sebagai medium dalam menstabilkan hubungan bilateral antar negara seperti Indonesia dan Malaysia yang merupakan negara serumpun, namun hal itu tidak luput dari sentimen negatif dari masyarakatnya. Dengan melihat hubungan Indonesia dan Malaysia dengan medium batik sebagai peredam ketegangan antara Indonesia dan Malaysia, penelitian ini diharapkan dapat mengkaji peran budaya dalam hubungan bilateral.

1.5 Kerangka Pemikiran Teoritis

1.5.1. Literature Review / Reviu Literatur

Pada penelitian ini dijelaskan mengenai *soft power* memiliki kekuatan dalam memberikan pengaruh negara-negara lain yang bekerjasama untuk memberikan pengaruh serta memperkuat posisi dalam jangka waktu yang panjang. Dalam tulisan Joseph Nye, dijelaskan mengenai *soft power* suatu negara tergantung pada bagaimana menampilkan budaya yang menarik dengan aspek nilai politik dan kebijakan yang sah secara moral (Nye, 2019). Hal itu menjadikan batik sebagai kekuatan diplomasi budaya di Indonesia. Diplomasi budaya sebagai salah satu turunan dari *soft power* dalam konteks warisan budaya takbenda yang kemudian dijadikan sebagai alat yang strategis dalam menyampaikan makna maupun narasi pada identitas nasional Indonesia, baik aktor negara maupun non-negara untuk mencapai kepentingan nasional dan internasional (Clarke, 2020). Konsep ini kemudian didukung melalui *heritage as diplomacy* yang dimana warisan budaya yang memiliki peran sebagai pembawa pesan (*carrier*) yang menghubungkan antara dua negara atau lebih yang secara historis berkaitan pula dengan budaya. Sehingga hal ini berfungsi sebagai penghubung diplomasi budaya antara Indonesia dan Malaysia dalam hubungan bilateralnya terus berjalan karena adanya persamaan sejarah (Todorović, 2022).

Batik masuk ke dalam Warisan Budaya Takbenda yang merupakan hasil dari urusan UNESCO agar meningkatkan legitimasi simbolik serta citra nasional Indonesia di ruang lingkup internasional. Sehingga UNESCO memasukkan kebudayaan pada kategori daftar warisan dunia agar mengingat bahwa warisan

budaya merupakan hal penting yang harus terus dilestarikan dan dijaga. Pada *Intangible Cultural Heritage* terdapat banyak praktik yang dianggap di dalam ruang lingkup mereka, seperti tradisi lisan, tarian daerah, musik, kerajinan tangan, pengetahuan budaya tradisional serta obat-obatan (Lázaro Ortiz & Jiménez De Madariaga, 2022).

Selanjutnya, ketika melihat ketegangan yang menyebabkan respon masyarakat menjadi sebuah sentimen negatif antara Indonesia dengan Malaysia atas klaim batik sebagai warisan budaya negara mereka masing-masing tidak terjadi secara tiba-tiba. Terdapat rangkaian insiden yang panjang dan secara masif terjadi pada tahun 2007 ketika program pariwisata *Malaysia Truly Asia* yang menampilkan beberapa elemen budaya yang Indonesia anggap sebagai warisan eksklusif milik Indonesia (Sunarti & Fadeli, 2021). Perdebatan ini akhirnya sampai pada titik dimana sejumlah masyarakat Indonesia menuntut penutupan Kedutaan Malaysia di Jakarta, hal ini memperlihatkan betapa dalamnya isu narasi klaim budaya ini (Chong, 2012). Situasi kemudian semakin memanas ketika batik masuk ke dalam perdebatan pada 2008, sehingga Malaysia aktif memasarkan batik ke pasar internasional (Clark, 2013). Kemudian, hal ini semakin parah ketika media online pada dua negara tersebut membahas realitas sengketa tersebut secara berbeda, yang dimana Indonesia cenderung melihat Malaysia terlalu dramatis dan provokatif, sedangkan Malaysia lebih tenang dalam merespon (Mulyana & Yaputra, 2020a). Sehingga, dinamika inilah yang akhirnya memberikan gambaran mengapa batik akhirnya bertransformasi lebih sekadar kain bermotif menjadi alat politik yang diperdebatkan, karena hal yang dipertaruhkan tidak hanya kepemilikan atas batik

sebagai warisan budaya, melainkan identitas nasional itu sendiri (Febriani et al., 2023).

Selanjutnya, Indonesia dan Malaysia tentu pernah mengalami ketegangan satu sama lain. Karena mereka sebuah negara serumpun, kesamaan budaya dan kesenian tentu merupakan hal wajar. Terlebih lagi budaya tidak bisa di klaim secara eksklusif oleh suatu negara. Sehingga, identitas antar negara bukanlah sesuatu hal yang bersifat permanen, melainkan dibentuk melalui proses interaksi yang terus ada (Wendt, 1992). Hal ini menimbulkan sentimen negatif antara Indonesia dan Malaysia yang muncul mengenai narasi klaim budaya, khususnya batik, yang dimana hal itu bukan sesuatu yang dapat diubah, melainkan dapat dikelola melalui perubahan praktik interaksi antara kedua negara, salah satunya melalui pendekatan soft diplomasi.

Dengan adanya ketegangan tersebut, Indonesia mengambil langkah yang strategis dengan mengajukan batik ke UNESCO untuk mendapatkan dukungan serta pengakuan sebagai Warisan Budaya Takbenda atau *Intangible Cultural Heritage* (ICH). Pada tanggal 2 Oktober 2009, UNESCO secara resmi mengakui batik sebagai ICH Indonesia yang hal ini berdampak tidak hanya di ranah nasional saja, namun juga mengubah strategi diplomasi budaya terhadap batik (Febriani et al., 2023). Dalam pengakuan yang ditulis Marshall Clark disebut Indonesia kini memegang legitimasi internasional yang tidak bisa digugat secara formal oleh negara manapun, sehingga tidak perlu bersikap defensif dalam mempertahankan klaim atas batik (Clark, 2013). Maka dari itu, ketika tanggal 2 Oktober yang diperingati sebagai Hari Batik Nasional dan direspons oleh Presiden Susilo

Bambang Yudhoyono, hal ini untuk menghimbau masyarakat Indonesia untuk mengenakan batik yang kemudian dikeluarkanlah kebijakan Batik sebagai instrumen penguatan identitas nasional pasca pengakuan (Kunjuraman et al., 2025). Walaupun begitu ketegangan yang ada belum sepenuhnya padam, namun dengan bertahap memberikan ruang bagi batik yang awalnya dipertahankan secara defensif dari ancaman negara lain, perlahan bertransformasi menjadi instrumen diplomasi budaya yang secara strategis dapat membangun kepercayaan dan menstabilkan hubungan bilateral Indonesia-Malaysia (Chong, 2012; Febriani et al., 2023).

1.5.2 Kerangka Pemikiran

Dalam penelitian ini *soft power* menggunakan tiga sumber utama yaitu meliputi budaya, nilai-nilai politik, serta kebijakan luar negeri yang memiliki otoritas moral. Kekuasaan juga memiliki kemampuan serta sumber daya yang dapat mempengaruhi hasil. Kerjasama pun bisa terjalin tanpa adanya paksaan dari salah satu pihak. Sehingga kekuatan negara tidak serta merta digunakan dalam *soft power* dalam menjalin kerja sama. Maka dari itu, hasil yang didapatkan akan sesuai dengan tujuan ketika tiap negara saling menghargai nilai, kesejahteraan yang dibangun, dan saling terbuka. Dalam kekuasaan pun dibagi dua meliputi Soft Power dan Hard Power, yang dimana dalam penelitian ini *soft power* yang akan digunakan. *Hard power* cenderung menekan negara dengan tekanan militer, sedangkan *soft power* menggunakan kemampuan membujuk, mempengaruhi serta membuat suatu negara bertindak dan tertarik tanpa adanya paksaan. *Soft power* juga menggunakan pendekatan untuk menjalin kerjasama (Nye, 2019). Pada penelitian ini, *soft power*

milik Nye (2019) dipahami sebagai sumber daya kekuasaan yang memungkinkan Indonesia membangun daya tarik dan mempengaruhi persepsi pihak lain melalui budaya. Hal ini kemudian dalam memanfaatkan *soft power* yang dijalankan melalui diplomasi publik, yaitu pendekatan yang digunakan dalam membangun hubungan dan interaksi dengan publik di negara lain. Sehingga pada konteks budaya, pendekatan tersebut kemudian diarahkan pada diplomasi budaya sebagai bentuk pemanfaatan budaya dalam hubungan internasional.

Setelah melihat *soft power*, penelitian ini menggunakan pemikiran Todorović (2022) mengenai *heritage as diplomacy* untuk menjelaskan bagaimana warisan budaya dapat berperan dalam hubungan antarnegara. Todorović (2022) membedakan *heritage as diplomacy* dan *heritage in diplomacy*. *Heritage as diplomacy* menempatkan warisan budaya sebagai pembawa (*carrier*) relasi diplomatik karena warisan tersebut merepresentasikan keterkaitan sejarah dan budaya yang dimiliki oleh dua negara atau lebih (Todorovic, 2022). Dalam penelitian ini, batik diposisikan sebagai *heritage as diplomacy* karena keterkaitan sejarah dan budaya Indonesia dan Malaysia menjadikan batik tidak hanya sebagai objek budaya, tetapi juga sebagai pembawa pesan mengenai hubungan dan keterkaitan antar kedua negara sebagai negara serumpun.

Soft power melakukan praktik yang dimana diplomasi budaya merupakan turunan dari *soft power* kemudian menuju pada diplomasi publik yang selanjutnya bertemu dengan diplomasi budaya. Dalam David Clarke (2020) didefinisikan bahwa diplomasi budaya sebagai kebijakan luar negeri dimana negara memiliki mobilisasi budaya yang dimiliki untuk memberikan pengaruh ke ruang

internasional. Sehingga, batik tidak hanya diposisikan sebagai identitas nasional, namun bisa digunakan sebagai medium dalam membangun kepercayaan dan menstabilkan hubungan bilateral Indonesia dan Malaysia yang sudah ada hingga saat ini (Clarke, 2020).

Diplomasi budaya dalam penelitian ini selanjutnya menjadi bentuk konkret dari pemanfaatan batik sebagai sumber daya budaya pada Indonesia. Batik sebagai Warisan Budaya Takbenda yang telah diakui UNESCO menjadi objek budaya yang kemudian dimobilisasi melalui berbagai kegiatan dan strategi diplomasi. Maka dari itu, untuk melihat bagaimana diplomasi budaya diimplementasikan, penelitian ini menggunakan dibantu dengan kerangka Goff (2020) yang melihat implementasi diplomasi budaya melalui empat aspek, yaitu aktor, tujuan (*outcome*), ruang lingkup budaya, dan model hubungan. Keempat aspek tersebut digunakan untuk mengidentifikasi bagaimana suatu diplomasi budaya dapat dikatakan sebagai diplomasi budaya (Goff, 2020). Sehingga pada bentuk strategi diplomasi budaya Indonesia melalui batik serta keterkaitannya dengan upaya membangun hubungan bilateral Indonesia dan Malaysia dapat dibantu oleh pemikiran Goff.

Dengan demikian, ketika peneliti melihat pada alur pemikiran penelitian, hal ini tidak menempatkan *soft power* dan diplomasi budaya sebagai konsep yang berdiri sendiri, melainkan sebagai rangkaian yang saling berkaitan. *Soft power* menjadi sumber daya tarik yang kemudian menggunakan *Heritage As Diplomacy* Todorovic (2022) untuk membawa budaya sebagai pesan (*carrier*) yang kemudian di dukung dengan diplomasi publik menjadi pendekatan dalam membangun hubungan dengan publik. Namun dalam penelitian ini melihat diplomasi budaya

yang menjadi bentuk pemanfaatan budaya pada batik dalam hubungan internasional. Batik kemudian menjadi medium budaya yang digunakan dalam strategi diplomasi budaya dalam menganalisis ketegangan, dengan statusnya sebagai Warisan Budaya Takbenda Indonesia.

Alur ini kemudian digunakan untuk menganalisis strategi diplomasi budaya Indonesia melalui batik pada periode 2019–2025, mulai dari potensi batik sebagai soft power, bentuk implementasi nya melalui diplomasi budaya, analisis strategi berdasarkan kerangka Goff, hingga respons yang muncul dalam konteks hubungan Indonesia dan Malaysia.

1.6 Operasional Konsep

Dalam bagian ini akan menjabarkan konsep-konsep utama yang digunakan dalam penelitian ini yaitu *Soft Power* dan Diplomasi Budaya, serta *Intangible Cultural Heritage*. Hal ini agar dapat dipahami dan dianalisis secara konsisten dalam penelitian ini. Operasional konsep dibagi menjadi dua bagian yaitu definisi konseptual yang menjelaskan pemahaman teoritis dari masing-masing konsep, serta definisi operasional yang menerjemahkan konsep tersebut ke dalam bentuk indikator dan implementasi yang dapat diamati dalam konteks diplomasi budaya batik antara Indonesia dan Malaysia.

1.6.1 Definisi Konseptual

Peneliti akan membahas mengenai definisi konseptual yang berkaitan dengan topik penelitian yang dikaji oleh peneliti. Hal ini meliputi tiga hal yaitu, *soft*

power, diplomasi budaya, dan *Intangible Cultural Heritage*. Pada penelitian ini juga menggunakan pemikiran *heritage as diplomacy* dari Todorović (2022) sebagai konsep yang menjembatani posisi batik sebagai sumber daya tarik budaya dengan strategi diplomasi budaya ketika adanya ketegangan pada narasi klaim batik.

1.6.1.1 *Soft Power*

Strategi diplomasi budaya pada *soft power* menggunakan bentuk non-koersif yang digunakan oleh Indonesia untuk mempengaruhi aktor negara-negara lain dengan menggunakan pendekatan budaya pada batik. Dalam konsep Joseph Nye (2004) menjelaskan bahwa *soft power* memainkan peran penting ketika suatu negara menciptakan citra dan mendominasi pengaruh negaranya di ruang lingkup internasional. Tidak ada tekanan militer dan *hard power* yang diberikan pada pendekatan ini. (Nye, 2019). Kemudian, *soft power* yang merupakan pendekatan diplomasi publik yang kemudian diturunkan pada diplomasi budaya.

Pada definisi Nye (2019) dalam tulisannya, Nye mendefinisikan bahwa *soft power* merupakan kemampuan sebuah negara dalam mempengaruhi negara lain dengan daya tarik daripada menggunakan tekanan, serta imbalan. Kekuasaan tidak hanya dipahami sebagai kekuatan militer, namun sebagai kemampuan dalam membentuk persepsi orang lain secara tidak langsung. Selanjutnya, Nye (2019) memiliki tiga elemen utama yaitu budaya, nilai politik, dan kebijakan luar negeri. Dalam penelitian ini, budaya menjadi salah satu sumber *soft power* yang dapat diterima oleh kalangan masyarakat internasional. Nilai Politik dan Kebijakan Luar Negeri ikut beriringan dalam kontribusinya meningkatkan daya tarik suatu negara

di mata dunia melalui diplomasi antar negara. Dengan membangun citra positif dan pengaruh internasional, diplomasi tentu akan terjalin (Nye, 2019). Citra positif ini bisa berupa Hari Batik Nasional, Pertukaran Budaya dengan batik dengan pameran batik di Moskow sebagai penguatan identitas budaya dan nation branding di ruang internasional (Massabuau, 2021; Febriani et al., 2023).

Sehingga, *soft power* sangat berkaitan erat dengan hubungan internasional, terlebih lagi di era globalisasi. Dimana peran aktor non-negara, media, dan teknologi semakin meluas jangkauan yang bisa diraih. Hal ini juga berpengaruh pada pandangan negara lain pada nilai-nilai juga sangat berpengaruh pada *soft power*. Sehingga budaya bisa memiliki persamaan bukan karena paksaan, melainkan karena adanya interaksi dan pertukaran budaya seperti pendidikan dalam pertukaran pelajar, perdagangan, hingga sejarah yang senasib (Nye, 2019).

Pada penelitian ini, *soft power* menjadi landasan utama untuk menganalisis bagaimana Indonesia memanfaatkan batik sebagai medium dalam hubungan bilateralnya dengan Malaysia, khususnya dalam meredam sentimen negatif yang telah berulang kali muncul di antara kedua negara tersebut. Ketika melihat pada keterkaitannya pada diplomasi publik, Nye (2019) menjelaskan bahwa *soft power* dapat dibangun melalui hubungan jangka panjang dengan publik di negara lain, termasuk melalui pertukaran budaya dan interaksi antar masyarakat (Nye, 2019). Oleh karena itu, diplomasi publik dalam penelitian ini tidak ditempatkan sebagai konsep yang berdiri sendiri, melainkan sebagai pendekatan dan konsep pendukung yang menjelaskan bagaimana daya tarik budaya dapat dikomunikasikan kepada publik dan membangun hubungan dalam jangka panjang.

Dalam *soft power* ini kemudian di dukung dengan konsep *heritage as diplomacy* milik Todorovic (2022) yang digunakan dalam penelitian ini untuk menjelaskan posisi batik sebagai warisan budaya yang tidak hanya memiliki nilai budaya, tetapi juga dapat berperan sebagai pembawa pesan dalam hubungan diplomatik. Todorović (2022) membedakan *heritage in diplomacy* dan *heritage as diplomacy*. *Heritage in diplomacy* menempatkan warisan budaya sebagai bagian dari aktivitas diplomasi tertentu, sedangkan *heritage as diplomacy* melihat warisan budaya sebagai pembawa relasi diplomatik karena memiliki keterkaitan sejarah dan budaya yang menghubungkan dua negara atau lebih (Todorović, 2022).

Konsep *heritage as diplomacy* kemudian menjadi penghubung antara *soft power* dan diplomasi budaya. Apabila *soft power* melihat batik berdasarkan daya tarik budaya yang dapat mempengaruhi persepsi tanpa paksaan, maka *heritage as diplomacy* dapat melihat bagaimana batik sebagai warisan budaya membawa keterikatan sejarah dan budaya yang dapat menjadi bagian dari hubungan diplomatik. Selanjutnya, posisi tersebut dianalisis melalui diplomasi budaya untuk melihat bagaimana batik dimobilisasi dalam praktik hubungan internasional (Todorović, 2022).

1.6.1.2 Diplomasi Budaya

Pada definisi David Clarke (2020) kebijakan luar negeri di seluruh negara berusaha untuk memanfaatkan budaya yang dimiliki dalam memberikan pengaruh di ruang internasional. Budaya tidak hanya dipahami sebagai ekspresi suatu identitas tertentu, namun bisa menjadi alat yang digunakan negara dalam mempromosikan budaya negara tersebut serta menjalin kerjasama antar negara.

Tentu hal ini tanpa menggunakan paksaan di dalamnya. Diplomasi budaya pun berkaitan erat dengan warisan budaya sebagai medium utamanya. Tidak hanya sebagai alat untuk memperkenalkan budaya ke ruang internasional, tetapi diplomasi budaya bisa digunakan sebagai memperkuat kepercayaan antar negara. Diplomasi budaya tidak hanya melibatkan aktor negara saja, pihak aktor non-negara juga terlibat di dalamnya seperti masyarakat, media hingga sebuah komunitas seni. Maka dari itu, diplomasi budaya merupakan salah satu instrumen yang digunakan dalam *nation branding* dan *nation image* suatu negara di era globalisasi (Clarke, 2020).

Diplomasi budaya juga didukung melalui pernyataan Todorovic (2022) yang membedakan sebuah heritage antara *heritage in diplomacy* dan *heritage as diplomacy*. *Heritage in diplomacy* memposisikan warisan budaya sebagai aktivitas diplomasi yang berupa bantuan konservasi maupun mentransfer teknologi dalam pelestarian yang diberikan suatu negara kepada negara lain. Ketika melihat *heritage as diplomacy* yang melihat warisan budaya tidak hanya sekedar objek maupun alat saja, namun sebagai pembawa pesan utama dalam hubungan diplomatik. Warisan budaya yang penting bagi kedua negara atau lebih menjadi simbol dalam menghubungkan negara-negara tersebut secara historis dan kultural. Dalam penelitian ini, batik memiliki posisi sesuai dengan *heritage as diplomacy* karena batik tidak hanya sebagai pembawa pesan dalam ikatan sejarah dan budaya antara Indonesia dan Malaysia yang merupakan negara serumpun (Todorović, 2022).

Diplomasi budaya juga didukung pada pemikiran Goff (2020) bahwa diplomasi budaya, propaganda, dan *soft power* sebagai “*semantic muddle*” yang berarti diplomasi budaya sebagai bentuk propaganda nasional yang berorientasi

pada kepentingan diri (*self-interested-national-propaganda*), serta terjadinya tumpang tindih yang dijelaskan oleh Snow (2020) yang menjelaskan bahwa propaganda tidak selalu bermakna satu arah dan koersif, pertukaran budaya dan pendidikan dapat membuat propaganda tersebut menjadi positif “*positive propaganda forces in foreign affairs*” dengan kekuatan yang mempersatukan demokrasi serta memperluas kepentingan dan saling pengertian satu sama lain, dibandingkan memaksakan suatu narasi. Dengan adanya pergeseran itulah mengapa propaganda dapat berhimpitan dengan *soft power* karena keduanya sama-sama mengandalkan daya tarik dan pertukaran budaya, bukan tekanan yang sejalan oleh Nye (2020) yang menggunakan *soft power* tanpa ada tekanan (Nye, 2019; Goff, 2020; Snow, 2020).

1.6.1.3 *Intangible Cultural Heritage*

Intangible Cultural Heritage (ICH) yang biasa disebut warisan budaya takbenda merupakan bagian dari warisan budaya yang meliputi keterampilan, ekspresi, pengetahuan serta representasi budaya yang diwariskan secara turun temurun dan diakui oleh kelompok maupun komunitas masyarakat yang merupakan bagian dari identitas budaya mereka. Dalam warisan budaya yang berkembang dari pemahaman mengenai bagaimana suatu kehidupan sosial berjalan diantara masyarakat. Budaya menurut Edward Burnett Tylor mendefinisikan budaya sebagai suatu hal yang kompleks meliputi pengetahuan, kepercayaan, seni, hukum, dan kemampuan dan kebiasaan yang diperoleh oleh masyarakat (Jokilehto, 2005). Maka dari itu, budaya tidak hanya sebuah benda, namun bisa mencakup nilai, praktik

sosial, hingga kebiasaan interaksi masyarakat yang sering terjadi di aktivitas manusia.

UNESCO melalui *Convention for the Safeguarding of the Intangible Cultural Heritage* memberi narasi bahwa warisan budaya takbenda tidak hanya dipahami sebagai pelestarian budaya, tetapi dapat sebagai identitas sosial dan budaya yang terus dikembangkan oleh masyarakat sesuai dengan sejarah yang terjadi, interaksi sosial, dan lingkungan yang berlangsung (UNESCO, 2003). Selanjutnya, UNESCO menjelaskan bahwa *Intangible Cultural Heritage* memiliki peran penting dalam meningkatkan kesadaran terhadap berbagai ragam budaya. Dari mempresentasikan kreativitas masyarakat di tingkat global. Dalam *Representative List of the Intangible Cultural Heritage of Humanity*, narasi mengenai pengakuan terhadap warisan budaya takbenda memiliki tujuan untuk mendorong narasi, sehingga mencerminkan keragaman budaya di seluruh dunia dan menjadi bukti kreativitas manusia. Sehingga, dengan adanya pelestarian ICH tidak hanya melibatkan negara saja sebagai aktor utama, namun aktor non-negara dapat berpartisipasi seperti komunitas kelompok, organisasi, hingga individu yang memiliki keterkaitan dengan warisan budaya tersebut (UNESCO, 2003). Maka dari itu, ICH tidak hanya alat untuk melestarikan budaya, tetapi dapat menjadi medium untuk representasi budaya, pembentukan identitas, serta menjalin interaksi sosial antar masyarakat maupun antar negara. Dengan begitu, warisan budaya takbenda memiliki keterkaitan dengan hubungan internasional karena bisa menciptakan hubungan antar negara yang lebih kooperatif.

1.6.2 Definisi Operasional

Penelitian ingin memuat diplomasi budaya yang kemudian di operasionalisasikan sebagai bentuk aktivitas non-koersif yang dilakukan dalam bentuk pemanfaatan budaya sebagai medium untuk membangun hubungan antar masyarakat yang sudah ada, kemudian menciptakan ruang interaksi budaya di tengah ketegangan yang ada antara Indonesia dengan Malaysia. Untuk melihat implementasinya, penelitian ini selain memuat konsep, peneliti ingin melihat bagaimana aktor yang terlibat, interaksi budaya, serta implikasinya terhadap kedua negara.

Penelitian ini secara operasional mengikuti alur konseptual yang telah tertera. *Soft power* digunakan untuk mengidentifikasi potensi daya tarik batik sebagai sumber daya budaya Indonesia, *heritage as diplomacy* digunakan untuk melihat posisi batik sebagai pembawa keterkaitan historis dan budaya antara Indonesia dan Malaysia, sedangkan diplomasi budaya digunakan untuk mengidentifikasi bentuk pemanfaatan batik dalam kegiatan dan strategi diplomatik. *Intangible Cultural Heritage* digunakan untuk memberikan batasan bahwa objek budaya yang dianalisis adalah batik sebagai warisan budaya takbenda.

Soft power Nye (2019) dan diplomasi budaya David Clark (2020) sebagai konsep memiliki hubungan yang saling melengkapi satu sama lain. Namun tentu berada pada level yang berbeda. *Soft power* memposisikan budaya, pada batik dalam penelitian ini, sebagai sumber daya tarik suatu negara, yakni kapasitas untuk mempengaruhi persepsi pada negara lain tanpa paksaan. Sedangkan, diplomasi budaya memposisikan sebagai instrumen konkret yang memiliki mobilisasi oleh

negara maupun aktor non-negara dalam mencapai tujuan kebijakan luar negeri. Sehingga diplomasi budaya menjadi mekanisme operasional dalam mengoperasikan daya tarik negara pada praktik hubungan antarnegara. Maka dari itu, penelitian ini mengoperasionalisasikan batik sebagai sumber *soft power* dan sebagai instrumen diplomasi budaya Indonesia terhadap Malaysia.

Namun dalam analisis implementasi, penelitian ini menggunakan kerangka konsep Patricia M. Goff (2020) yang menekankan pergeseran fokus dari definisi menuju penilaian terhadap outcome (tujuan) dan cara kerja aktor dalam mencapai tujuan diplomasi budaya. Patricia M. Goff (2020) menyatakan adanya perdebatan apakah suatu aktivitas tertentu tergolong diplomasi budaya atau bukan, sehingga mengaburkan potensi suatu budaya dalam membentuk hasil sosial-politik dan ekonomi yang nyata. Berdasarkan pemikiran tersebut, peneliti menggunakan 4 parameter berdasarkan pemikiran Goff (2020) dari (i) aktor yang terlibat, (ii) orientasi tujuan, (iii) cakupan budaya, serta (iv) model relasi (Goff, 2020, dalam Snow et al., 2020).

1.6.2.1 *Soft Power*

Dalam penelitian ini, *soft power* digunakan sebagai alat daya tarik dengan menggunakan batik sebagai mediumnya, terlebih dalam hubungan bilateral Indonesia dan Malaysia. *Soft power* tetap relevan dengan hubungan internasional yang dimana pengaruh dibangun berdasarkan daya tarik warisan budaya, bukan melalui paksaan dan tekanan. Sehingga dalam penelitian ini batik diposisikan

sebagai sumber *soft power* Indonesia menunjukkan identitas budaya nasional (Nye, 2019).

Dalam konteks hubungan bilateral Indonesia dan Malaysia, penggunaan batik sebagai medium menjadi penting dalam menurunkan eskalasi yang memicu sentimen negatif akibat ketegangan yang ada. Terlebih lagi, warisan budaya tidak bisa dimiliki secara eksklusif suatu negara. Dengan begitu, *soft power* dalam penelitian ini digunakan sebagai media yang membangun daya tarik warisan budaya Indonesia yang mempengaruhi persepsi masyarakat, baik negara sendiri maupun ruang internasional, termasuk Malaysia.

Soft power melalui batik sangat efektif ketika suatu negara menampilkan daya tarik budaya negaranya masing-masing kepada ruang internasional. Kemudian, *soft power* dengan batik ini juga bekerja di masyarakat negara setempat. Melalui diaspora yang panjang, daya tarik batik sebagai *soft power* bukan sesuatu yang asing bagi masyarakat Indonesia maupun Malaysia. Dengan ini, batik memiliki potensi lebih besar sebagai medium *soft power* ketika adanya eskalasi diantara kedua negara sedang terjadi, karena menghidupkan kembali kedekatan kedua negara tersebut dengan budaya yang sudah ada sebelumnya (Sunarti & Fadeli, 2021). Maka dari itu, indikator *soft power* dalam penelitian ini dilihat dari penggunaan batik untuk membangun daya tarik budaya, memperkenalkan budaya Indonesia, membentuk persepsi positif, serta menciptakan ketertarikan dan interaksi tanpa menggunakan tekanan atau paksaan yang berguna dalam meredam ketegangan pada narasi klaim batik.

1.6.2.2 Diplomasi Budaya

Diplomasi budaya merupakan strategi yang digunakan dalam narasi warisan budaya bersama. Diplomasi budaya menurut David Clarke (2020) merupakan salah satu instrumen yang digunakan dalam nation branding dan nation image suatu negara di era globalisasi (Clarke, 2020). Di Indonesia dalam menggunakan batik sebagai alat strategi diplomasi budaya terhadap Malaysia, sehingga Indonesia bisa memberikan pengaruh di ruang internasional. Dalam penelitian ini ingin melihat bagaimana Indonesia memanfaatkan budayanya untuk mengurangi eskalasi yang terjadi atas dampak ketika terjadinya ketegangan terhadap hubungan bilateral Indonesia dan Malaysia dengan menggunakan batik. Batik digunakan sebagai alat komunikasi yang tidak hanya menampakkan identitas nasional suatu individu, tetapi bisa menjadi ruang untuk terus mempererat hubungan bilateral yang sudah terjalin dan mengurangi ketegangan.

Salah satu halnya seperti kebijakan pemerintah Indonesia mempromosikan batik sebagai identitas nasional dengan penetapan Hari Batik setiap 2 Oktober dalam penguatan narasi budaya. Kemudian, keterlibatan instansi pemerintah seperti Kementerian Luar Negeri, Kementerian Budaya, maupun Kedutaan Besar Republik Indonesia dalam memperkenalkan batik di Malaysia maupun forum bilateral, termasuk pameran budaya di luar negeri bisa menjadi salah satu upayanya (Massabuau, 2021). Diplomasi budaya dengan batik pada penelitian ini tidak hanya dilihat sebagai strategi pembentukan citra negara, namun hal ini berupaya untuk meredam sentimen negatif dalam hubungan bilateral Indonesia dan Malaysia yang sudah terjalin hingga saat ini.

Diplomasi budaya Indonesia dan Malaysia juga tidak lepas dari ketegangan. Hubungan bilateral kedua negara tersebut diperparah oleh narasi klaim warisan budaya di media yang melibatkan batik menjadi salah satu konfliknya. Meskipun Malaysia tidak pernah mengajukan klaim batik ke UNESCO sebagaimana menurut Marshall Clark (2013), narasi yang beredar luas di media Indonesia memicu persepsi publik yang berbeda-beda di Masyarakat. Sehingga hal ini menimbulkan sentimen negatif di tingkat masyarakat. Hal ini kemudian mendorong Indonesia menggunakan diplomasi budaya serta terus mempertahankan hubungan bilateralnya dengan Malaysia (Clark, 2013).

Namun, konsep *soft power* Nye (2019) dan diplomasi budaya David Clarke (2020) yang telah dijelaskan perlu memiliki alat ukur untuk menilai implementasinya dengan pemikiran Goff (2020) yang menekankan fokus diplomasi budaya menuju penilaian terhadap aktor dan tujuan yang akan dicapai. Goff (2020) melihat bahwa perdebatan mengenai apakah suatu aktivitas tergolong dalam diplomasi budaya atau bukan, namun perlu diarahkan pada bagaimana budaya digunakan untuk menghasilkan tujuan (*outcome*) tertentu. Hal ini menjadi penting karena dalam penelitian ini strategi diplomasi budaya tidak hanya dilihat dari kegiatan budaya saja, tetapi dilihat siapa yang menjalankannya, tujuan yang ingin dicapai, bentuk budaya yang digunakan, serta bagaimana hubungan antar aktor dibangun dalam proses tersebut. Sehingga penelitian ini dengan Goff (2020) menunjukkan bahwa diplomasi budaya dapat dilihat dari aktor yang terlibat, tujuan (*outcome*) yang ingin dicapai, cakupan budaya yang berkembang, serta perubahan model diplomasi dari “*club*” menuju “*network*” sehingga hal ini digunakan dalam

menganalisis implementasi strategi diplomasi budaya Indonesia melalui batik dalam hubungan bilateral dengan Malaysia (Goff, 2020, dalam Snow et al., 2020).

Dalam konsep Goff (2020) dijelaskan dalam dua kutub diplomasi budaya, yaitu berpusat pada aktor negara dan keterlibatan aktor non-negara. Hal ini digunakan untuk melihat sejauh mana implementasi diplomasi budaya batik melibatkan aktor negara seperti Kementerian Luar Negeri dan KBRI Kuala Lumpur, maupun aktor non-negara seperti komunitas budaya, komunitas UMKM batik, dan diaspora. Meskipun negara dapat menjadi pergerakan suatu inisiatif, namun hal ini juga memerlukan dukungan aktor non-negara seperti komunitas seni, pengusaha, dan bahkan pengrajin. Keterlibatan aktor non-negara membuat diplomasi budaya tidak terlalu berasosiasi dengan kepentingan negara sehingga lebih efektif. Kemudian, orientasi terhadap tujuan (outcome), merujuk pada argumen Goff (2020) dalam bagian "*Shifting from Definitions to Outcomes*". Hal ini digunakan untuk melihat apakah aktivitas diplomasi budaya batik berkontribusi terhadap terbentuknya mutual understanding maupun de-eskalasi ketegangan antara Indonesia dan Malaysia, bukan sekadar bersifat simbolik.

Tujuan tersebut kemudian tidak dapat dilepaskan dari cakupan budaya yang digunakan, merujuk pada pembahasan yang mengenai pergeseran orientasi diplomasi budaya dari budaya tinggi menuju budaya modern serta pengaruh digitalisasi. Goff (2020) menunjukkan bahwa cakupan budaya dalam diplomasi budaya telah berkembang dari penekanan "*high culture*" menuju "*popular culture*", sehingga hal ini digunakan untuk melihat apakah diplomasi budaya batik hanya dijalankan melalui hal formal seperti pameran resmi, atau turut menjangkau ranah

media sosial, mengingat eskalasi sentimen negatif sebagai dalam kasus Aisha Retno pada tahun 2025 sebagai contoh, justru muncul dan berkembang di ruang digital.

Selanjutnya, perkembangan cakupan tersebut kemudian berkaitan dengan perubahan model relasi diplomasi, merujuk pada pembahasan Goff (2020) mengenai pergeseran model diplomasi dari "*club*" menuju "*network*" (Goff, 2020, dalam Snow et al., 2020). Konsep ini digunakan untuk menilai sejauh mana implementasi diplomasi budaya batik telah bergeser dari interaksi formal antar pemerintah menuju jaringan yang lebih luas dan inklusif. Sehingga konsep Goff (2020) tersebut menjadi alat ukur operasional yang menghubungkan soft power sebagai sumber daya tarik budaya dan diplomasi budaya sebagai mekanisme non-koersif, dengan implementasi strategi diplomasi budaya batik Indonesia terhadap Malaysia, sehingga penelitian ini tidak berhenti pada level konseptual, melainkan mampu menilai implementasi strategi tersebut secara empiris.

Sehingga dalam implementasi strategi diplomasi budaya melalui batik terhadap Malaysia tidak hanya dilihat dari segi sejarah dan simbolik saja dari pemikiran Goff (2020) dalam melihat alat ukurnya. Implementasi tersebut dapat tercermin dari keterlibatan aktor negara dan non-negara dalam berbagai kegiatan promosi budaya, seperti penetapan Hari Batik Nasional, pameran budaya yang diselenggarakan oleh instansi pemerintah seperti KBRI di Kuala Lumpur, workshop membatik di luar negeri dalam mempelajari teknik membuatnya, maupun UMKM yang berpartisipasi dalam pameran yang diselenggarakan di luar negeri. Sehingga pencapaian tujuan yang berupa penguatan mutual understanding dan peredam ketegangan dari sentimen negatif yang mencangkup batik dari forum

formal hingga media sosial yang populer dapat dilakukan dalam strategi diplomasi budaya. Dengan hal ini menunjukkan bahwa diplomasi budaya dengan alat pada batik sebagai soft power masih sangat relevan karena legitimasi di ruang lingkup internasional saja tidak cukup untuk meredam sentimen negatif di ruang publik berbasis digital (Clarke, 2020; Goff, 2020, dalam Snow et al., 2020).

1.6.2.3 *Intangible Cultural Heritage*

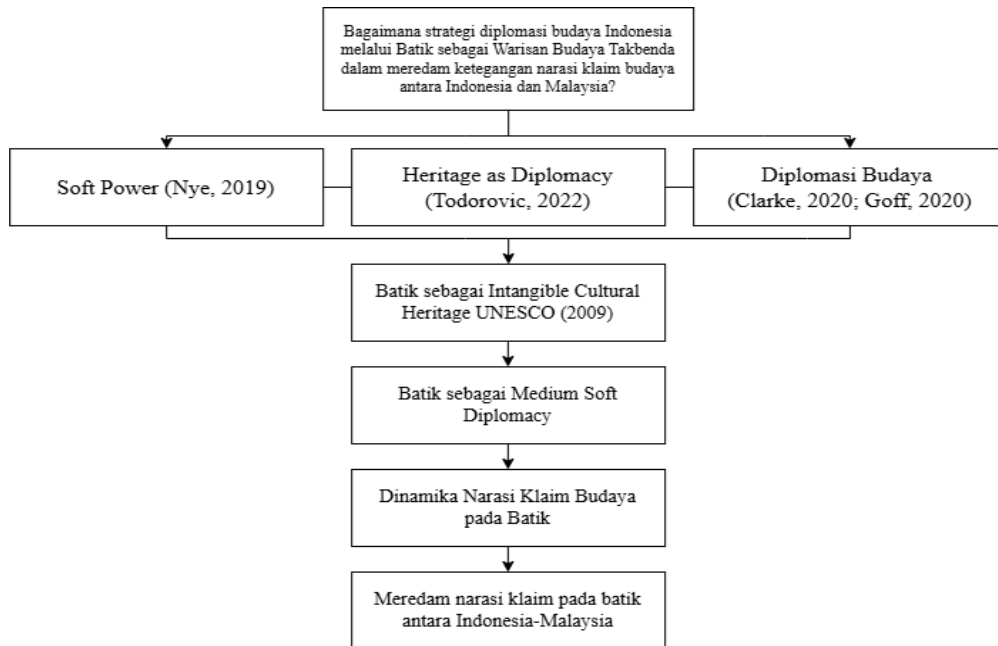
Intangible Cultural Heritage dioperasionalkan pada budaya batik sebagai warisan budaya takbenda yang menjadi objek dalam strategi diplomasi budaya Indonesia. Dalam penelitian ini, *Intangible Cultural Heritage* tidak digunakan sebagai alat ukur implementasi diplomasi budaya, melainkan sebagai batasan terhadap objek budaya yang dianalisis, yaitu batik Indonesia yang telah diakui UNESCO pada 2 Oktober 2009. *Intangible Cultural Heritage* di operasionalkan dengan batik sebagai medium diplomasi budaya Indonesia di ruang internasional. Dengan adanya narasi pengakuan dari UNESCO pada 2 Oktober 2009 sebagai Warisan Budaya Takbenda. Narasi pengakuan ini kemudian diperkuat melalui Keputusan Presiden No. 33 Tahun 2009 yang menetapkan 2 Oktober sebagai Hari Batik Nasional. Dengan legitimasi internasional, hal ini menjadi titik awal Indonesia untuk aktif dalam menggunakan batik sebagai medium soft power dalam menjalankan diplomasi antar negara.

Sejak saat itu, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dan Kementerian Luar Negeri mengintegrasikan batik dalam strategi diplomasi budaya secara aktif dari tahun 2010, batik mulai masuk ke dalam pelestarian budaya dan strategi

diplomasi budaya Indonesia hingga saat ini. Tahun 2015, batik mulai banyak diekspor keluar negeri melalui diplomasi budaya. Pada penelitian Destriyani, terdapat promosi kegiatan oleh KBRI di Jepang secara konsisten untuk memperkenalkan batik (Destriyani et al., 2020). Kemudian tahun 2021 pada penelitian Hariyadi, Indonesia menggunakan batik pada pameran pesona yang diselenggarakan di Moskow yang dibantu oleh KBRI Moskow pada saat itu (Massabuau, 2021). Hingga saat ini batik masih digunakan Indonesia dalam diplomasi budaya. Dengan begitu, batik tidak lagi hanya sekadar ekspresi tradisi suatu negara, namun dapat menjadi medium ketika Indonesia melakukan strategi diplomasi budaya nya menuju forum internasional (UNESCO, 2011, 2024).

Batik dalam hubungan bilateral Indonesia dan Malaysia dapat dilihat dari adanya narasi klaim budaya ini yang memicu ketegangan antara hubungan Indonesia dan Malaysia, terlebih lagi dari respon masyarakat kedua negara. Produk budaya batik yang berkembang di Jawa juga berkembang dalam budaya Melayu dalam proses diaspora pada abad ke-16, sehingga batik bukanlah budaya eksklusif milik Indonesia karena diaspora tersebut (Sunarti & Fadeli, 2021). Dengan adanya narasi argumen terkait pengakuan UNESCO 2009 bukan hanya sekadar simbolik milik Indonesia saja melainkan titik awal rekonstruksi narasi yang lebih kooperatif, dari batik sebagai objek sengketa menjadi medium diplomasi budaya.

1.7 Alur Berpikir



Gambar 1.1 Alur Berpikir

Peneliti memiliki rumusan masalah dalam penelitian ini terkait bagaimana strategi diplomasi budaya Indonesia melalui Batik sebagai Warisan Budaya Takbenda milik UNESCO tahun 2009 dalam meredam ketegangan narasi klaim budaya antara Indonesia dan Malaysia. Karena hal ini juga dipengaruhi dari interaksi masyarakat kedua negara sehingga munculnya dinamika narasi klaim budaya yang menimbulkan sentimen negatif antar masyarakat (Chong, 2012, Mulyana & Yaputra, 2020)

Dengan begitu, peneliti menggunakan soft power Joseph Nye (2019) dan Diplomasi Budaya David Clark (2020) untuk melihat bagaimana budaya dapat berfungsi sebagai pendekatan non-koersif dalam membangun hubungan yang lebih positif antarnegara. Menurut Nye (2019) bahwa terdapat beberapa hal yang mempengaruhi diplomasi budaya yang meliputi budaya itu sendiri. Budaya yang

berkembang di suatu negara, menjadikan daya tarik dalam soft power suatu negara. Kemudian, nilai-nilai politik yang dimana suatu negara secara konsisten menjalankan hubungan dengan negara lain dengan soft power (Nye, 2019). Sedangkan menurut David Clark, diplomasi budaya dipengaruhi oleh persepsi masyarakat serta citra negara di mata internasional. Hubungan bilateral juga berpengaruh satu sama lain (Clarke, 2020).

Dalam penelitian ini, batik telah memperoleh pengakuan UNESCO sebagai *Intangible Cultural Heritage* yang tidak hanya sebagai alat warisan budaya, namun bisa digunakan sebagai alat diplomasi budaya. Dalam pengakuan UNESCO tahun 2009, batik merupakan bagian dari upaya yang dilakukan oleh Indonesia dalam menjaga dan memperkuat warisan budaya yang dimiliki melalui UNESCO. Tentu bisa digunakan sebagai promosi negara melalui budaya, kerjasama antar negara, serta keterlibatan aktor negara dan non-negara.

Hal ini juga melihat bagaimana batik digunakan sebagai media *soft power* dalam strategi diplomasi budaya dalam membangun citra positif di ruang internasional, serta hal ini membantu dalam meredam ketegangan satu sama lain ketika adanya narasi mengenai klaim suatu budaya, khususnya batik dalam penelitian ini. Selanjutnya, penelitian ini melihat strategi diplomasi budaya Indonesia dengan batik tidak berdasarkan hanya pada pengakuan UNESCO tahun 2009, namun peneliti melihat bagaimana Indonesia akan membangun batik khas Indonesia sebagai media untuk memperkenalkan batik di ruang internasional. Hal ini tidak luput dari respons masyarakat akan narasi klaim budaya yang muncul dan berkembang diantara masyarakat Indonesia maupun Malaysia.

1.8 Argumen Penelitian

Penelitian ini memiliki argumen bahwa batik digunakan sebagai media *soft power* dalam meredam ketegangan akibat narasi klaim budaya antara Indonesia dan Malaysia yang dimana penelitian ini akan menganalisis sejauh mana kebijakan pemerintah, kegiatan promosi budaya, serta aktor-aktor yang terlibat dalam mencerminkan diplomasi budaya dengan *soft power* pada batik yang tentu menggunakan konsep *soft power* dan diplomasi budaya. Hal ini juga didukung dengan mengukur sejauh mana ketegangan tersebut dapat diredam, peneliti menggunakan empat parameter, yaitu (i) aktor yang terlibat, (ii) orientasi atau tujuan, (iii) cakupan budaya, dan (iv) model relasi yang terbentuk.

1.9 Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode pendekatan kualitatif, karena peneliti berusaha untuk memahami bagaimana batik menjadi medium dalam respon sentimen negatif pada hubungan bilateral Indonesia dengan Malaysia.

1.9.1 Tipe Penelitian

Pada penelitian ini metode yang digunakan adalah kualitatif deskriptif. Pendekatan ini bertujuan untuk memahami mengenai strategi diplomasi budaya pada pemerintahan Indonesia melalui simbol batik sebagai Warisan Budaya Takbenda. Serta, menganalisis bagaimana batik dapat digunakan sebagai medium dalam membangun citra budaya yang baik dan merespon ketegangan dalam hubungan bilateral Indonesia-Malaysia yang sudah ada.

1.9.2 Situs Penelitian

Penelitian ini akan berfokus kepada batik yang menjadi strategi diplomasi budaya dalam menurunkan eskalasi pada ketegangan atas narasi klaim budaya antara hubungan Indonesia dengan Malaysia. Dalam hubungan bilateral Indonesia dengan Malaysia, Kedutaan Besar Republik Indonesia Kuala Lumpur memiliki posisi yang cocok dalam membangun citra positif Indonesia. Terlebih lagi ketika munculnya narasi klaim budaya yang beredar di media sosial, sehingga peneliti menjadikan Kementerian Luar Negeri Indonesia di Kuala Lumpur dan Kementerian Budaya Republik Indonesia menjadi tempat yang relevan dalam keberlangsungan penelitian untuk memahami bagaimana diplomasi budaya melalui batik dapat diimplementasikan pada praktik hubungan internasional. Tentu data ini pun akan didukung oleh data sekunder yang berasal dari dokumen resmi UNESCO terkait *Intangible Cultural Heritage*, serta sumber lain yang relevan dengan penelitian.

1.9.3 Subjek Penelitian

Subjek yang digunakan dalam penelitian ini meliputi aktor yang bergerak dalam pelaksanaan diplomasi budaya batik, khususnya staf maupun pejabat di KBRI Kuala Lumpur dan Kemenbud RI yang memiliki peran dalam kegiatan diplomasi publik serta promosi budaya Indonesia melalui wawancara online.

1.9.4 Jenis Data

Penelitian ini memuat jenis data kualitatif yang bersumberkan dari data primer yang berasal melalui wawancara kepada informan seperti staf ataupun pejabat KBRI Malaysia. Kemudian, data sekunder yang digunakan berupa jurnal

artikel, dokumen tertulis, artikel ilmiah, dan berita yang relevan dengan penelitian. Peneliti juga menggunakan Apify dalam mengambil data pada postingan Twitter/X untuk diolah kembali serta sebagai data pendukung.

1.9.5 Sumber Data

Data yang diperlukan peneliti terdiri dari data primer yang berupa wawancara secara online dengan narasumber di Kementerian Budaya dan KBRI Kuala Lumpur. Selanjutnya, data sekunder yang diperoleh dari pihak kedua seperti artikel jurnal, buku, dan sumber berita yang berkaitan dengan topik penelitian.

1.9.6 Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini dengan wawancara dengan narasumber secara online, kemudian menggunakan studi pustaka baik dari dokumen maupun artikel yang mendukung penelitian. Peneliti juga menggunakan metode scrapping yang ada pada media Apfy. Apify sebagai media untuk membantu pengumpulan data melalui proses scraping pada Twitter dengan periode waktu tertentu serta kata kunci yang dibutuhkan dengan Apify gratis yang terbatas. Serta, peneliti menggunakan Twitter/X yang digunakan sebagai aktor dalam pengolahan data pada Apify.

1.9.7 Teknik Analisis Data

Data yang diperoleh akan menggunakan metode analisis Miles dan Huberman (1994). Ketika data telah dikumpulkan, selanjutnya data akan menggunakan teknik siklus kualitatif tiga tahap meliputi reduksi data, penyajian data, dan kesimpulan (Saleh, 2017).

1.9.8 Kualitas Data (*Goodness Criteria*)

Untuk menjamin penelitian ini dalam keabsahan dan objektivitas, penelitian ini akan membandingkan data berdasarkan hasil wawancara dengan data sekunder yang telah ditemukan oleh peneliti, selanjutnya peneliti juga akan menggunakan sumber literatur yang relevan serta kredibel yang sesuai dengan topik penelitian untuk mendukung validitas dan reliabilitas data.